

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Ardiwilaga, R. Roestandi, *Hukum Agraria Indonesia*, Bandung-Jakarta, Masa Baru, 1960.
- Asikin, Amiruddin dan Zinal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2004.
- Bushar, Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita, 2006.
- D. S, Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Alia, 2012.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Skripsi Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Yogyakarta, Liberty, 2003.
- Hajati, Sri, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, dan Oemar Moechtar, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya, Airlangga University Press, , 2017.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006..
- Mertokusumo, Sudikno, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, Renika Cipta, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nawawi, Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Press Yogyakarta, 1992.
- Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa, (Terjemahan Handoyo)*, Jakarta, LP3ES, 2003.

Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Mimin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, Disertasi)*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006.

Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni Bandung, 1975.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH perdata)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003.

Sumardjono, Maria S.W., *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2014.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2011.

Sutedi, Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan tanah untuk Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Suyanto, B. dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010.

Syahrur, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Bengkalis-Riau, DOTPLUS Publisher, 2002.

T.M, Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta, Rajawali, 1989.

Tukgali, Lieke Lianadevi, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kertas Putih Communication, 2010.

Usman, Abdul Hamid, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Palembang, Tunas Gemilang, 2015.

Widjaja, H.A.W., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2043).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Pusat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2012, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156).

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 55).

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (Badan Negara Tahun 2016 Nomor 53).

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pnegelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, (Badan Daerah Tahun 2017 Nomor 35).

Peraturan Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa, (Badan Daerah Tahun 2012 Nomor 11).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa, (Badan Daerah Tahun 2013 Nomor 65).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Tas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Daerah Tahun 1954 Nomor 5).

Peraturan Daerah Isimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1).

Internet

Artikel Kalurahan sriharjo.bantulkab.go.id, “Profile Kalurahan Sriharjo”, <https://sriharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/7>, diakses pada 7 Maret 2024, Pukul 19:35 WIB.

Artikel Kalurahan sriharjo.bantulkab.go.id, “Profile Kalurahan Sriharjo”, <https://sriharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/7>, diakses pada 7 Maret 2024, Pukul 19:35 WIB.

Artikel Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 5, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024, Pukul 16:14 WIB.

Jurnal

Sari, Nova Permata dan Robby Darwis Nasution, Pemanfaatan Tanah Kas Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Dengan Sistem Lelang Tenah, Volume 5 Nomor 3, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Ponorogo, 2021.

Savitri, Miya, Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Desa, Jilid 1 Terbitan 2, *Jurnal Panorama Hukum*, Malang, 2006.

Sy’ban, Syihabudin dan Hanafi Tanaijaya, Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Pemerintah Kelurahan (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Kelapa Dua Dan Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang), Volume 2 Nomor 2, *Jurnal Hukum Adigama*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2019.

Hidayat, Ahmad Arif, Nyoman Seikat PJ, dan Sukinta, Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana, Volume 6 Nomor 2, , *Diponegoro Law Journal*, Semarang, 2017.

Herman, Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara, Volume 1 Nomor 1, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Makasar, 2015.

Skripsi dan Tesis

Aini, Salamah Nur, “Aspek Hukum Dalam Proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Dengan Tanah Hak Milik (Studi Kasus Di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.

Purbaningrum, Novita, “Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Dengan Tanah Hak Milik Perorangan Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri)”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.